

# HUMAS UNIVERSITAS INDONESIA

## KLIPING

**KLASIFIKASI** : Universitas Indonesia – Penulis  
**TEMA** : Abdurrahman Wahid dan Agenda Pasca-SI MPR  
**SURAT KABAR/MAJALAH** : Kompas

Hari Selasa Tanggal 19 Bulan Juni Tahun 2001 Halaman 4 Kolom 3

### RINGKASAN

Di bawah kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid, Indonesia saat ini mengalami proses transisi serba sulit, dengan tantangan, kendala, dan hambatan struktural-kultural amat berat. Untuk sebagian besar, hal itu disebabkan pemerintahan Abdurrahman Wahid yang lamban menjalankan misi transisi akibat kepemimpinannya yang lemah, tidak kreatif, dan manajemen pemerintahan model *begitu saja kok repot*, yang ternyata tidak sinkron dengan praktik-praktik manajemen pemerintahan modern. Secara obyektif, menurut akademisi John Bresnan (Columbia University, AS) dan Jeffrey A Winters (Northwestern University, AS), kondisi ini menggambarkan, pemerintahan Gus Dur dalam mengemudikan roda pemerintahan guna mengatasi krisis ekonomi jauh lebih buruk dibanding dengan, misalnya, pemerintahan Kim Daejung dari Korea Selatan dan pemerintahan Chuan Luk Pai (sebelum diganti Thaksin) dari Thailand. Gus Dur dapat dikatakan kurang memberi sinyal-sinyal positif yang menunjukkan ke arah perbaikan, bahkan kepemimpinannya mengalami krisis legitimasi. Konflik antara Presiden dan DPR, yang berlangsung sejak munculnya masalah *Bullogate-Bruneigate* hingga puncaknya dengan pengagendaan SI MPR untuk minta pertanggungjawaban kepada Presiden, membuat tidak adanya kepemimpinan nasional yang efektif untuk menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah, terutama dibidang ekonomi. Untuk itu SI MPR yang diagendakan diselenggarakan 1 Agustus 2001, diharapkan dapat menghasilkan suatu kepemimpinan politik yang didukung mayoritas parlemen. Sehingga ke depan, pemerintah dengan kepemimpinan yang baru dapat menjalankan program ekonomi dengan baik karena mendapat persetujuan parlemen. Demikian yang ditulis Vishnu Juwono. Alumnus FE-UI dan staf pengajar Program Extension FEUI, sedang studi pascasarjana di Columbia University, New York, AS.

### CATATAN :

# Abdurrahman Wahid dan Agenda Pasca-SIMPR

**T**RANSISI rezim otoriter Orde Baru yang ekonominya tersentralisasi pada Soeharto dan kroni-kroninya, dengan praktik birokrasi dan bisnis yang amat korup dan tidak efisien, memerlukan proses panjang dan acap kali lamban. Setidaknya hal itu telah terjadi pada era BJ Habibie dan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dewasanya ini. Demokratisasi dan kebebasan untuk mengakhiri rezim otoriter itu, untuk mengubahnya menjadi negara demokratis, akan menjadi keniscayaan, apabila sebagian besar pengelolaan sumber daya ekonomi sebagian besar diserahkan kepada masyarakat madani (*civil society*) dan pasar, dengan praktik *good governance* yang sungguh-sungguh dilaksanakan. Dalam transisi ini, media massa, DPR, LSM, dan *civil society* harus terus mengawasi praktik penyimpangan yang terjadi, yang merupakan suatu proses penuh ketidakpastian, kekhawatiran, dan keceemasan.

Di bawah kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid, Indonesia saat ini mengalami proses transisi serba sulit, dengan tantangan, kendala, dan hambatan struktural-kultural amat berat. Untuk sebagian besar, hal itu disebabkan pemerintahan Abdurrahman Wahid yang lamban menjalankan misi transisi akibat kepemimpinannya yang lemah, tidak kreatif, dan manajemen pemerintahan model *begitu aja kok report*, yang ternyata tidak sinkron dengan

praktik-praktik manajemen pemerintahan modern. Padahal manajemen modern ini merupakan syarat mutlak bagi Indonesia agar dapat berkiprah kembali sebagai salah satu pejalaku ekonomi utama di Asia. Sebagai ilustrasi, dengan adanya "pertentangan" antara pihak eksekutif dengan legislatif dan antara pemerintah dengan IMF (IMF menunda pengiriman tim monitoringnya) serta Bank Dunia (Bank Dunia dalam ketiduran resmi mengatakakan akan mengurangi bantuannya kepada Indonesia), serta masuknya berita kerusuhan di Sampit pada laporan utama majalah *Time* dan *New York Times* beberapa bulan lalu, membuat masyarakat internasional dan para investor menyimpulkan, peluang keadaan politik dan ekonomi Indonesia menjadi stagnan, mandeg.

Secara obyektif, menurut akademisi John Bresnan (Columbia University, AS) dan Jeffrey A Winters (Northwestern University, AS), kondisi ini menggambarkan, pemerintahan Gus Dur dalam mengemukakan roda pemerintahan guna mengatasi krisis ekonomi, jauh lebih buruk dibandingkan dengan, misalnya, pemerintahan Kim Dae-jung dari Korea Selatan dan pemerintahan Chuan Luk Pai—sebelum diganti Thaksin—dari

Thailand. Gus Dur dapat dikatakan kurang memberi sinyal-sinyal positif yang menunjukkan ke arah perbaikan, bahkan kepemimpinannya mengalami krisis legitimasi.

Krisis legitimasi itu makin parah ketika memasuki Sidang Tahunan MPR 8-17 Agustus 2000, di mana untuk menghindari ancaman pemberhentian jabatan (semacam *impeachment*) dari MPR, Presiden Abdurrahman Wahid menawarkan konsensi kepada kekuatan-kekuatan politik yang ada. Konsensi itu adalah pemberian wewenang kepada Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri untuk menjalankan roda pemerintahan sehari-hari. Dengan adanya ketentuan itu Megawati dapat memimpin rapat kabinet, membuat program dan agenda kabinet dan mengevaluasi kinerja kabinet. Selain itu Megawati diberi otoritas menandatangani surat-pengangkatan pejabat-pejabat tinggi negara, pengangkatan pimpinan militer dan perubahan departemen. Semua wewenang itu dituangkan pada Keputusan Presiden Nomor 121 Tahun 2000.

Diharapkan setelah sidang tahunan, sebagai hasil kesepakatan antar-elite politik, Presiden dapat merestrukturisasi kabinet dan menggantikan personalnya dengan figur yang kompeten,

OLEH VISHNU JUWONO

terutama yang berlatar belakang tekrokrasi untuk portofolio ekonomi. Namun yang terjadi, kabinet baru yang diumumkan justru menggambarkan pengutamaan kepentingan politik Presiden untuk melang-

gengkan kekuasaannya. Pasar amat kecewa dengan figur-figur Kabinet Jilid II, terutama pada sosok Menteri Keuangan Priyadi Praptosuhardjo yang tidak lulus *fit and proper test*. Yang lebih mengecewakan lagi, terutama bagi Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri, adalah penghapusan wewenang Wapres untuk

(Bersambung ke hlm 5 kol 5-8)

POJOK KOMPAS

(Sambungan dari halaman 4)

ikni menyetujui dan mendatangi pengangkatan pejabat tinggi negara. Dengan adanya dua tindakan presiden itu praktis sebagian besar kompromi yang telah disepakati pada Sidang Tahunan MPR tahun 2000 dilanggar Presiden Abdurrahman Wahid sendiri.

Kecewa dengan "pengkhianatan" yang dilakukan Presiden atas kesepakatan Sidang Tahunan MPR ditambah kinerja yang terus memburuk di bidang ekonomi dan merembet pada masalah keamanan, membuat DPR menyampaikan memorandum pertama dan kedua, yang bermuara pada pengajuan Sidang Istimewa MPR untuk meminta pertanggungjawaban presiden. Perselisihan antara legislatif dengan presiden inilah yang membuat kondisi politik menjadi tidak stabil dan membuat kepemimpinan Abdurrahman Wahid untuk menjalankan program-program pemulihan ekonomi tidak efektif.



SELAIN faktor politik, kebijakan-kebijakan ekonomi yang dikeluarkan tim ekonomi yang dipimpin Rizal Ramli, meminjam wacana ekonomi Sjahrir, "berkontribusi besar" pada belum pulihnya perekonomian Indonesia. Pertumbuhan ekonomi yang dibanggakan tim ekonomi Rizal Ramli hampir lima persen, secara kasat mata belum dapat dikatakan mengembalikan Indonesia pada posisi perekonomian sebelum krisis. (Catatan: Rizal Ramli semula Menko Perekonomian, dan sejak pertengahan pekan lalu diangkat menjadi Menteri Keuangan. Jabatan Menko Perekonomian diserahkan kepada Burhanuddin Abdullah).

Akibat krisis, perekonomian Indonesia mengalami kontraksi sebesar 14 persen. Perekonomian Indonesia harus dapat tumbuh delapan persen selama dua tahun berturut-turut agar dapat menyerap pengangguran yang timbul akibat krisis. Ditambah lagi nilai tukar rupiah atas dollar AS yang terus melemah hingga Rp 11.200-Rp 11.300 per dollar AS. Angka-angka ini tentu tidak berdiri sendiri, sebaliknya merupakan refleksi dari ketidakjelasan tim ekonomi dalam menentukan prioritas kebijakan ekonomi dan implemenasinya.

Struktur keuangan Indonesia yang dapat diperbaiki dengan upaya percepatan penjualan aset oleh BPPN, restrukturisasi utang swasta dan pencabutan subsidi pada barang-barang

konsumsi tidak dapat dijalankan secara optimal. Berdasarkan laporan *World Bank* Maret 2001, Indonesia hanya mampu menjual tujuh persen dari aset yang dikelola BPPN—mewakili pemerintah. Angka itu tentu amat kecil dibanding Thailand, Korea, dan Malaysia yang masing-masing mampu menjual sebesar 70 persen, 48 persen, dan 61 persen dari total aset yang dimiliki. Dalam hal restrukturisasi utang swasta terlihat, kepentingan politis masih mewarnai kebijakan ini. Dalam rapat dengar pendapat dengan DPR, Dirjen Lembaga Keuangan Darmin Nasution mengkritik wewenang Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK). Di bawah pimpinan Rizal Ramli komite ini tidak lagi mengarahkan kebijakan bagi BPPN, tetapi menjadi pemutus kesepakatan restrukturisasi utang debitor, kasus demi kasus, dengan contohnya restrukturisasi utang Texmaco Group senilai 2,7 milyar dollar AS.

Belum cukup dengan kebijakan ekonomi yang tidak kredibel, hubungan antara IMF dengan Tim Ekonomi Indonesia terus memburuk. Salah satu masalah yang menjadi persoalan adalah masalah amandemen UU Bank Indonesia di mana ada keinginan pemerintah untuk mengganti dewan gubernur dengan memanfaatkan revisi UU BI itu. Puncak dari perselisihan itu adalah tertundanya pencairan dan bantuan dana 400 juta dollar AS yang seharusnya turun Desember 2000 dengan alasan menunggu revisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Maka tidak mengherankan Megawati Soekarnoputri, sebagai orang yang diberi tanggung jawab menyelesaikan masalah perekonomian oleh presiden, meminta bantuan Widjojo Nitisastro dan Emil Salim untuk memberi masukan seputar revisi APBN dalam rangka memperbaiki hubungan Indonesia dengan IMF.



BISA dikatakan, Indonesia merupakan negara yang belum dapat mengkonsolidasi elemen-elemen yang menunjang tumbuhnya stabilitas politik bila dibanding, misalnya, Thailand, dan Korea Selatan. Yang terjadi adalah instabilitas politik secara kontinyu. Konflik antara presiden dan DPR, yang berlangsung sejak munculnya masalah *Bullogate-Bruneigate* hingga puncaknya dengan pengagendaan SI MPR untuk meminta pertanggungjawaban kepada Presiden, membuat tidak adanya kepemimpinan nasio-

nal yang efektif untuk menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah, terutama di bidang ekonomi.

Untuk itu SI MPR yang di-agendakan diselenggarakan 1 Agustus 2001, diharapkan dapat menghasilkan suatu kepemimpinan politik yang didukung mayoritas parlemen. Sehingga ke depan, pemerintah dengan kepemimpinan yang baru dapat menjalankan program ekonomi dengan baik karena mendapat persetujuan parlemen. Tentunya Megawati Soekarnoputri, di mana partainya mempunyai jumlah kursi terbesar di parlemen, merupakan figur yang cocok untuk menjalankan kepemimpinan baru itu, baik hanya sebagai kepala pemerintahan ataupun presiden, tergantung hasil SI MPR. Namun, yang perlu diperhatikan adalah jangka waktu dua bulan sebelum diadakan sidang istimewa adalah waktu yang cukup lama. Dikhawatirkan Presiden Abdurrahman Wahid mengeluarkan kebijakan-kebijakan politik atau ekonomi yang dapat menambah kerusakan ekonomi maupun timbulnya ketegangan politik baru. Kebijakan melakukan *reshuffle* kabinet serta pertentangan Presiden dengan Kapolri merupakan bukti empirik dari kekhawatiran itu.

Meski ekspor tahun 2001 ini meningkat, tetapi di masa datang prestasi ini amat sulit diulang, mengingat negara Amerika Serikat dan Jepang—dua negara utama tujuan ekspor Indonesia—diperkirakan pada tahun 2001 ini pertumbuhan ekonominya melambat. Kurs rupiah yang melemah pada level Rp 11.000-an mempunyai implikasi pada bidang sektor riil dan moneter. Barang kebutuhan sehari-hari yang meningkat tentu akan menurunkan tingkat konsumsi masyarakat Indonesia secara keseluruhan, menunjukkan adanya gangguan pada sektor riil.

Dari sisi moneter, dengan adanya depresiasi rupiah maka usaha untuk restrukturisasi utang dan usaha penjualan aset dalam rangka membuat struktur keuangan menjadi lebih sehat menjadi tidak layak. Sebab depresiasi rupiah ini membuat biaya restrukturisasi menjadi lebih tinggi, mengingat sebagian besar utang perusahaan besar Indonesia dalam dollar AS. Begitu pula pada usaha penjualan aset yang dikuasai BPPN, dengan nilai buku diperkirakan sebesar 50 persen dari GDP, akan menjadi tertunda karena menghindari terjadinya penjualan aset dengan harga sangat murah.

Sehingga ada beberapa agenda utama yang perlu diperhatikan dan dijalankan pemerintah pasca-SI MPR mendatang, sesudah adanya kestabilan dalam kepemimpinan politik bagi usaha pemulihan ekonomi.

Pertama, personel dari kabinet ekonomi yang baru harus berasal dari golongan profesional/independen dan amat kompeten, dengan kemampuan teknokrasi yang tinggi. Sebab dalam melakukan diplomasi dengan lembaga keuangan internasional—IMF, World Bank—tim ekonomi harus dapat memahami ide-ide yang dikemukakan lembaga itu. Isu-isu penting seperti ekonomi pasar, kestabilan moneter, privatisasi, liberalisasi perdagangan umumnya hanya dipahami kaum teknokrat atau kaum profesional. Dalam menjalankan program kerjanya, kabinet profesional ini harus didukung kalangan LSM, kelompok prodemokrasi dan masyarakat madani untuk memperkuat kinerja dan basis legitimasinya.

Kedua, setelah terbentuk tim ekonomi, mereka harus diberi kewenangan dan keleluasaan dari presiden maupun parlemen dalam menjalankan program ekonomi. Hal ini dapat dicapai dengan mengadakan konsensus antara pemerintah dengan parlemen mengenai dukungan politik kepada kebijakan ekonomi pemerintah. Sehingga terjadi sinkronisasi antara stabilisasi politik dan stabilisasi ekonomi.

Ketiga, pemerintah harus dapat membuat skala prioritas terhadap berbagai kebijakan ekonomi yang ingin diimplementasikan. Penjualan aset dan restrukturisasi utang swasta perlu mendapat prioritas utama karena bila berhasil dilaksanakan, maka hutang pemerintah dapat dibayar sebagian dengan hasil penjualan ini.

Bila ketiga langkah ini dijalankan, IMF memperkirakan pemulihan ekonomi akan tercapai dalam 10 tahun. Sebaliknya bila gagal, krisis ekonomi kedua bagi Indonesia tinggal menunggu waktu. Tentunya korban terbesar dari kondisi ini, pada akhirnya, adalah jutaan rakyat kecil yang mayoritas tak berdos. Di sinilah moralitas dan etika harus menjadi pegangan utama para pemimpin, teknokrat, dan pejabat negara dalam mengelola perekonomian, mengambil keputusan dan kebijakan.

◆ Vishnu Juwono, alumnus FE-UI dan staf pengajar Program Extension FEUI, sedang studi pascasarjana di Columbia University, New York, AS.